

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Arief Barda, Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Askin, Moh, 2015, *Kompilasi Penerapan Hukum oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, Mahkamah Agung, Jakarta.

Atmasasmita, Romli, 2002, *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta.

B, Vettori. 2006. *Tough on Criminal Wealth: Exploring the Practice of Proceeds from Crime Confiscation in the EU*, Springer, Netherlands.

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah. 2009, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.

Chomarijah, Siti, 2015, *Integritas Hakim dalam Menghasilkan Putusan Tindak Pidana Korupsi*, Depublish, Yogyakarta.

Danil, Elwi, 2012, *Korupsi: Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajawali Press, Jakarta

Djaja, Ermasjah, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.

Djumhana, Muhammad, 2007, *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Edelherz, Helbert, 1997, *The Investigation of White Collar Crime A Manual for Law Enforcement Agencies*, U.S. Department of Justice: Office Regional Operation Law Enforcement Assistance Administration.

Effendy, Marwan, 2012, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Perkembangan dan Isu-Isu Aktual dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*, Referensi, Jakarta.

Hamzah, Andi, 1991, *Korupsi di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2012, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raagradindo Persada, Jakarta

_____, 2017, *Korupsi dan Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta.

Harahap, Yahya, *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, 2016, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta.

Kamil, Ahmad, 2016, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana Prenadamedia, Jakarta.

Kholis, Efi Laila, 2012, *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta.

Lamintang, P.A.F. 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, CV Arnico, Bandung.

Latief, Abdul, 2014, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2014, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Nasional, Badan Pembinaan Hukum, 2008, *Analisis dan Evaluasi Hukum Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

_____, 2012, *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.

Nurdjana, IGM, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Pardede, Rudi, 2016, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Pohan, Agustinus, Amien Sunaryadi, Denny Indrayanam Eddy O.S. Hiariej, Saldi Isra, Sigit Riyanto, Teten Masduki, Yenti Gunarsih, Zainal Arifin Mochtar, 2008, *Pengembalian Aset Kejahatan*, Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM bekerjasama dengan Kemitraan, Yogyakarta.

Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Saleh, Andi Ayyub, 2006, *Tamasya Perenungan Hukum dalam "Law in Book and Law in Action" Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, Yarsif Watampone, Jakarta.

Sinaga, Dahlan, 2015, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*, Nusa Media, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2005, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soemadiningrat, Otje Salman, 2009, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung

Surachman, RM, dan Jan S. Marinka, 2015, *Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Kawasan Asia Pasifik*, Sinar grafika, Jakarta.

Suyatno, 2005, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Utama, Paku, 2013, *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta.

Yanuar, Purwaning M., 2007, *Pengembalian aset hasil korupsi: berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam sistem hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zulkarnain, 2006, *Praktik Peradilan Pidana Panduan Praktis Kemahiran Hukum Acara Pidana*, Institute for Strengthening Transition Society Studies (In-TRANS), Malang.

ARTIKEL JURNAL

Adnan Topan Husodo, “Catatan Kritis atas Usaha Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi” dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2010.

Fatkurohman, 2017, “Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016”, *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi RI, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017.

Ginting, Jamin, “Perjanjian Internasional Dalam Pengembalian Aset Hasil korupsi di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, September 2011.

Hiariej, Eddy O.S, 2019, “United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol.31 Nomor 1, Februari 2019.

Ismansyah, 2017, “Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Demokrasi*, Vol. VI No. 2, 2017.

Mahmud, Ade, 2018, “Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Komisi Yudisial RI.*, Desember 2018.

Noviyanti, Rahma, 2019, “Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Wawasan Yuridika*, Vol.3, Nomor 1, Maret 2019.

Satyawan, Made Dudy, 2017, “Mengungkap Korupsi Melalui Bukti Audit Menjadi Bukti Menurut Hukum”, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 8, Nomor 1, April 2017.

Sholikin, Nur, 2017, “Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)”, *Jurnal Rechtsvinding, Badan Pembinaan Hukum Nasional RI*, 9 Februari 2017.

MAKALAH

Hamzah, Andi, “Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman”, Makalah, disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Tema *Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*, Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, tanggal 14-18 Juli 2003.

Lotulung, Paulus Efendi, “Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum”, Makalah, disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional VIII yang

diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di Denpasar pada tanggal 14-18 Juli 2003.

Soepardi, Eddy Mulyadi, 2009, “Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi”, Makalah Ilmiah yang disampaikan pada Seminar Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Bogor.

KARYA ILMIAH

Hasudungan S, Benget, 2016, *Optimalisasi Eksekusi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Thesis, Program Studi Magister Hukum Litigasi, UGM Yogyakarta.

Sultan, 2016, *Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Supandriyo, 2018, *Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Dengan Ancaman Minimum Khusus*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Triastuti, Adityawati, 2010, *Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

INTERNET

Anti-Corruption Clearing House, “Tata Laksana Benda Sitaan & Barang Rampasan Dalam Rangka Pemulihan Aset Hasil Tipikor”, <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/paper/tata-laksana-benda-sitaan-barang->

rampasan-dalam-rangka-pemulihan-aset-hasil-tipikor diakses 4 April 2020.

_____, "Aset Koruptor, Mengapa Harus Disita?",
<https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=143:aset-koruptor-mengapa-harus-disita>, diakses pada 2 Maret 2020.

Beritagar.id, "Hukuman Uang Pengganti Irman dan Sugiharto",
<https://beritagar.id/artikel/berita/hukuman-tambahan-uang-pengganti-irman-dan-sugiharto>, diakses 6 November 2019.

Hukum, Negara, "Korupsi Perspektif Konvensi PBB,"
<https://www.negarahukum.com/hukum/korupsi-perspektif-konvensi-pbb.html> diakses 6 November 2019.

Indonesia, Transparency International, "Corruption Perception Index 2018",
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2018, diakses 6 November 2019.

Indrawati, Sri Mulyani, 2016, "Peran Kemenkeu dalam Pemulihan Aset TPK" disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tata Laksana Benda Sitaan dan Barang Rampasan dalam Rangka Pemulihan Aset Perkara Tindak Pidana Korupsi", dalam <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/paper/tata-laksana-benda-sitaan-barang-rampasan-dalam-rangka-pemulihan-aset-hasil-tipikor> diakses 4 April 2020.

KBR, "Jaksa KPK: Kasus Korupsi e-KTP Sangat Sistematis, Terstruktur, Melibatkan Banyak Institusi" https://kbr.id/nasional/03-2017/jaksa_kpk_kasus_korupsi_e_ktp_sangat_sistematis_terstruktur_melibatkan_banyak_institusi/89111.html diakses 12 Maret 2020.

Kompas, "Menanti Pengungkapan Skandal Korupsi E-KTP",
<https://nasional.kompas.com/read/2017/03/07/06333891/menanti.pengungkapan.skandal.korupsi.e-ktp>. diakses 12 Maret 2020.

Mulyadi, Lilik, 2007, “Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi 2003”, Artikel ringkasan disertasi, dalam https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/asas_beban_pembuktian_terhadap_tipikor_dalam_hukum_pidana_indonesia.pdf diakses pada 4 April 2020.

Pos, Jawa, Terbukti Korupsi e-KTP, “Andi Narogong Divonis 8 Tahun Penjara”, <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/21/12/2017/terbukti-korupsi-e-ktp-andi-narogong-divonis-8-tahun-penjara/>, diakses 6 November 2019.

Sunendar, Dadang, “KBBI daring edisi kelima 2019”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda/Penyusun>, diakses 10 November 2019.

Watch, Indonesia Corruption, 2018 “Catatan Pemantauan Perkara Korupsi yang Divonis oleh Pengadilan Selama 2018”, https://antikorupsi.org/sites/default/files/narasi_tren_vonis_2018.pdf diakses tanggal 6 November 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Beijing Statement of Principles of the Independence the Law Asia Region of the Judiciary.

United Nations Convention Against Corruption, 2003

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 387.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4250.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5074.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan
Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2041, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 8.

PUTUSAN

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Jkt. Pst, tanggal 20 Juli 2017.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Nomor 32/PID.SUS/TPK/2018/PN.Jkt. Pst, tanggal 30 Juli 2018.